

Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)

Mochamad Iskarim

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan

e-mail: iskarim.moch@gmail.com

Abstract:

Globalization is shown by the development in science and technology which brings great effects including the positive and negative one. One of the negative effects of globalization is the emergence of consumerism, hedonism, and secularism which causes moral decadence of the nations. The worse condition of this condition can be seen from the bad attitude and behavior of the students. Therefore, Islamic education which has main role in constructing moral of the students should be rearranged to solve this problem. This condition shows the importance of revitalizing the strategy of Islamic education in minimizing moral decadence of the nations.

Keywords: *Globalization, Science Development, Moral Decadence, The Strategy of Islamic Education*

Abstrak:

Globalisasi ditunjukkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Perkembangan Iptek memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Di samping dampak yang positif, pada kenyataannya perkembangan Iptek menggoreskan banyak persoalan negatif, terutama kemerosotan moralitas generasi bangsa (dekadensi moral). Sebagai bawaan dari perkembangan Iptek, sikap konsumeristis, hedonistis, dan sekuleristis merupakan embrio terjadinya dekadensi moral generasi. Hal ini diperparah lagi ketika dekadensi moral ini sudah menggejala di kalangan pelajar tunas-tunas bangsa. Dengan demikian, pendidikan agama yang merupakan titik strategis dalam pembinaan moral harus berbenah dan mengukur kembali peran sertanya dalam persoalan tersebut. Di sinilah pentingnya revitalisasi strategi pendidikan agama Islam (PAI) dalam rangka meminimalisir dekadensi moral yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Kata Kunci: *Globalisasi, Perkembangan Iptek, Dekadensi Moral, Strategi PAI*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyisakan beberapa persoalan yang perlu perhatian. Tidak dipungkiri masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari (Iptek sebagai produk budaya), namun pada kondisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi canggih tersebut kurang mampu menumbuhkan moralitas (akhlak) yang mulia (Iptek sebagai faktor *conditioning*) (Abdul Munir Mulkhan, dkk, 1998:29). Perkembangan teknologi saat ini, yang ditandai hadirnya zaman modern, termasuk di Indonesia diikuti oleh gejala dekadensi moral yang benar-benar berada pada taraf yang memprihatinkan. Akhlak mulia seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong menolong, *tepo seliro* (toleransi), dan saling mengasihi sudah mulai terkikis oleh penyelewengan, penipuan, permusuhan, penindasan, saling menjatuhkan, menjilat, mengambil hak orang lain secara paksa dan sesuka hati, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain. Kemerostan moral atau yang sering kita dengar dengan istilah 'dekadensi moral' sekarang ini tidak hanya melanda kalangan dewasa, melainkan juga telah menimpa kalangan pelajar yang menjadi generasi penerus bangsa. Orang tua, guru, dan beberapa pihak yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, agama dan sosial banyak mengeluhkan terhadap perilaku sebagian pelajar yang berperilaku di luar batas kesopanan dan kesusilaan, semisal: mabuk-mabukan, tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, pergaulan dan seks bebas, bergaya hidup *hedonis* dan *hippies* di Barat, dan sebagainya. Dengan begitu, bukanlah tanpa bukti untuk mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki konsekuensi logis terciptanya kondisi yang mencerminkan kemerostan akhlak (dekadensi moral) (Haidar Putra Daulay, 2012:141).

Di antara akibat negatif dari era global ini, ialah nilai-nilai spiritualitas agama menjadi momok dalam kehidupan, agama hanya untuk akhirat, sementara urusan dunia tidak berkaitan dengan agama. Sebagian masyarakat menjauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai falsafah bangsa. Menurut Mudji Sutrisno (1994:178), sisi negatif dari

globalisasi ialah: (1) kecenderungan untuk massifikasi, penyeragaman manusia dalam kerangka teknis, sistem industri yang menempatkan semua orang sebagai mesin atau sekrup dari sebuah sistem teknis rasional; (2) *sekularisme*, yang berarti tidak diakuinya lagi adanya ruang nafas buat yang Ilahi, atau dimensi religious dalam hidup kita; (3) orientasi nilainya yang menomorsatukan *instant solution*, resep jawaban tepat, cepat, langsung.

Menurut Zakiah Daradjat (1979:10-20), kejadian sebagaimana dipaparkan di atas disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi cara berpikir manusia modern. Faktor-faktor penyebab kejadian tersebut antara lain kebutuhan hidup yang semakin meningkat, rasa individualistis dan egois, persaingan dalam hidup, keadaan yang tidak stabil, dan terlepasnya pengetahuan dari nilai-nilai agama. Sedangkan menurut Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf (2000:23) berpendapat bahwa saat ini masyarakat tengah mengalami krisis moral dan kejiwaan sebagai akibat dari gelombang krisis materialisme. Tradisi hidup materialistik tidak menjadikan moralitas sebagai anutan, akan tetapi kekayaan yang dijadikan ukuran kemuliaan dan kehormatan.

Dekadensi moral yang ditunjukkan oleh sebagian generasi muda harapan masa depan tersebut, meskipun tidak besar prosentasenya, namun menjadi sesuatu yang disayangkan dan bahkan mencoreng kredibilitas dan kewibawaan dunia pendidikan. Para pelajar yang seharusnya menunjukkan sikap dan perbuatan yang bermuatan akhlak mulia justru menunjukkan tingkah laku yang sebaliknya. Tidaklah berlebihan ketika dalam kasus ini kita sebagai pihak yang ikut andil dalam dunia pendidikan merasa gelisah dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Pendidikan memang mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai transfer nilai (*transformation of value*) dan transfer pengetahuan (*transformation of knowledge*). Sebagai fungsi transfer nilai, dunia pendidikan diharapkan mampu mentransfer nilai-nilai, norma-norma, dan budi pekerti luhur (*akhlakul karimah*). Sebagai fungsi transfer pengetahuan, dunia pendidikan diharapkan mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada anak didik (Nurul Zuriah, 2008:175). Persoalan yang muncul

kemudian adalah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diagung-agungkan justru tidak disertai dengan perkembangan nilai atau moralitas yang baik, malah justru sebaliknya. Menurut Zamroni (2000:90-91), untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman ini dibutuhkan pendidikan yang berwawasan global, pendidikan yang memiliki nilai lentur terhadap perkembangan zaman namun muatan nilai-nilai moral keagamaan tetap terpatri di dalamnya.

Sekali lagi, sebagai pihak yang ikut andil dalam dunia pendidikan, terkhusus pada pendidikan agama Islam (PAI), kita dihadapkan pada kondisi yang sangat perlu berbenah diri (*muhasabah*). Salah satu bentuk muhasabah tersebut adalah meramu strategi yang efektif dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam, sehingga tercipta format pendidikan agama Islam yang ideal dalam rangka meningkatkan moralitas generasi bangsa, khususnya para pelajar tunas masa depan.

Tulisan ini mencoba meneguhkan kembali peran strategis Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meminimalisir dekadensi moral para pelajar ataupun remaja generasi masa depan. Harapannya, upaya *revitalisasi* Pendidikan Agama Islam ini menjadi solusi efektif dan aplikatif, serta menjadi koreksi bersama dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau madrasah, terlebih lagi di perguruan tinggi tanpa terkecuali.

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DEKADENSI MORAL

Sebelum kita menawarkan solusi terbaik dari kejadian kemerosotan moral di kalangan generasi tunas bangsa, alangkah lebih baiknya kita mencari sebab atau mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya dekadensi moral. Banyak faktor yang bisa menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Diantaranya adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, longgarnya pegangan terhadap agama. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, dimana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak,

kepercayaan terhadap Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan perintah-perintah Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian, satu-satunya alat pengawas dan pengatur moral yang dimilikinya adalah masyarakat dengan hukum dan peraturannya. Namun biasanya pengawasan masyarakat itu tidak sekuat pengawasan dari dalam diri sendiri. Karena pengawasan masyarakat itu datang dari luar, jika orang tidak tahu, atau tidak ada orang yang disangka akan mengetahuinya, maka dengan senang hati orang itu akan berani melanggar peraturan-peraturan dan hukum sosial itu. Apabila dalam masyarakat itu banyak orang yang melakukan pelanggaran, dengan sendirinya orang yang kurang iman tadi akan mudah pula meniru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama (Zakiah Daradjat, 1978:66). Di sinilah yang menurut Abdul Munir Mulkhan (2008:29) sebagai “conditioning” terjadinya evolusi budaya masyarakat.

Akan tetapi, jika setiap orang dengan teguh memegang keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri dan mampu menyeleksi pengaruh dari lingkungan (“*Structured Person*” - meminjam istilah yang dipakai A. Munir Mulkhan). Sebaliknya, dengan semakin jauhnya masyarakat dan agama (sekuler), semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran hukum dan nilai moral.

Kedua, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Pembinaan moral yang dilakukan oleh ketiga institusi ini tidak berjalan menurut semestinya (normatif) atau yang sebisanya (objektif). Pembinaan moral di rumah tangga misalnya harus dilakukan dan sejak anak masih kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap yang dianggap baik untuk menumbuhkan moral, anak-anak akan dibesarkan tanpa mengenal moral itu. Pembinaan moral yang dilakukan di rumah tangga

bukan dengan menyuruh menghafal rumusan tentang baik dan buruk, melainkan harus dibiasakan. Zakiah Daradjat (1978:67) mengatakan, moral bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan mempelajari saja, tanpa membiasakan hidup bermoral sejak kecil. Moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian dan tidak sebaliknya.

Seperti halnya rumah tangga, yang dijadikan sebagai *basic-education*, sekolah pun memiliki peranan penting dalam pembinaan moral anak didik. Hendaknya sekolah dapat dijadikan sebagai lapangan untuk menumbuhkembangkan mental dan moral anak didik, disamping ilmu pengetahuan, pengembangan bakat dan kecerdasan. Untuk menumbuhkan sikap moral yang demikian itu, pendidikan agama di sekolah harus dilakukan secara intensif agar ilmu dan amal dapat dirasakan anak didik di sekolah. Apabila pendidikan agama/moral diabaikan di sekolah, maka pendidikan agama/moral yang diterima di rumah tidak akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin paradoks (berlawanan), dan berdampak pada kegagalan pendidikan moral.

Selain rumah tangga dan sekolah, masyarakat juga memiliki peran dalam pembinaan moral. Masyarakat dapat sebagai kontrol secara eksternal dan bersifat penting dalam pembinaan moral. Hadirnya masyarakat yang rusak moralnya akan sangat berpengaruh pada perkembangan moral anak. Karena kerusakan masyarakat itu sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan anak, maka harus segera diatasi. Terjadinya kerusakan moral di kalangan pelajar dan generasi muda sebagaimana dijelaskan di atas, bisa dikarenakan tidak efektifnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembinaan moral. Dengan begitu ketiga instansi pendidikan ini harus berjalan seiringan dalam pendidikan atau pembinaan moral. Hal senada juga disampaikan oleh Maragustam (2010:118), bahwa tanggung jawab pembinaan moral sebagai bagian dari pendidikan Islam merupakan perwujudan atas pendidikan keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui sekolah yang dimilikinya.

Ketiga, derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis. Seperti banyak informasi yang kita ketahui melalui beberapa

media cetak atau elektronik (televisi) tentang anak-anak sekolah menengah yang ditemukan oleh gurunya atau polisi mengantongi obat-obat terlarang, gambar-gambar dan video yang berbau porno, alat-alat kontrasepsi seperti kondom, dan benda-benda tajam. Semua benda yang ditemukan tersebut merupakan benda yang terindikasi atau ada kaitannya dengan penyimpangan moral yang dilakukan oleh kalangan remaja usia sekolah. Gejala penyimpangan tersebut terjadi karena pola hidup yang semata-mata mengejar kepuasan materi, kesenangan hawa nafsu, dan tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Timbulnya sikap perbuatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekuleristis yang disalurkan melalui tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, pertunjukan-pertunjukan, film, lagu-lagu, permainan-permainan, dan sebagainya. Penyaluran arus budaya yang demikian itu didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan kecenderungan para remaja, tanpa memerhatikan dampaknya bagi kerusakan moral. Derasnya arus budaya yang demikian disinyalir termasuk faktor yang paling besar andilnya dalam menghancurkan moral para remaja dan generasi tunas bangsa.

Keempat, belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Pemerintah yang diketahui memiliki kekuasaan (*power*), uang, teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya nampaknya belum menunjukkan kemauan sungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan moral bangsa (Abuddin Nata, 2012:207). Hal yang demikian semakin diperparah lagi oleh adanya ulah sebagian elite penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, peluang, kekayaan, dan sebagainya dengan cara-cara yang sama sekali tidak mendidik, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hingga kini belum ada tanda-tanda untuk hilang. Mereka asyik memperebutkan kekuasaan, materi, dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan tidak memperhitungkan atau bahkan sama sekali tidak memperhitungkan dampaknya bagi kerusakan moral bangsa. Bangsa jadi ikut-ikutan, tidak mau lagi mendengarkan apa yang disarankan dan

dianjurkan pemerintah, karena secara moral mereka sudah kehilangan daya efektivitasnya.

PENDIDIKAN AGAMA DAN KEDUDUKANNYA

Pendidikan agama di negara kita sebenarnya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Namun karena politik pendidikan pemerintah penjajah (Belanda), maka di sekolah-sekolah negeri tidak diberikan pendidikan agama. Politik pendidikan yang demikian dikatakan ‘neutraal’, artinya pihak pemerintah tidak mencampuri masalah pendidikan agama, sebab agama dianggap menjadi tanggung jawab keluarga (Zakiyah Daradjat, 1996:90).

Begitu panjang sejarah eksistensi pendidikan agama di negeri kita yang pada akhirnya mendapat kedudukan yang sangat diperhitungkan. Berdasarkan regulasi yang berlaku (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003), pendidikan agama adalah hak peserta didik. Diperjelas pada Undang-Undang tersebut Bab V pasal 12 ayat (1), yang berbunyi: setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak: (a) mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam penjelasan pasal 12 (1) a, disebutkan bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3). Dalam Undang-Undang Pendidikan sebelumnya, Undang-Undang No.2 Tahun 1989 disebutkan bahwa salah satu dari tiga mata pelajaran pendidikan (pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan) (UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat (2)).

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya yang dapat menjamin keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan rohaniyah (Zakiyah Daradjat, 1996:87).

Oleh karena agama sebagai dasar tata nilai dan penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pemahaman dan pengalamannya dengan tepat dan benar diperlukan untuk menciptakan kesatuan bangsa. Materi pendidikan agama bagi masing-masing pemeluknya berasal dari sumber-sumber agamanya masing-masing. Pelaksanaan pendidikan agama dilakukan oleh pengajar yang meyakini, mengamalkan, dan menguasai materi agama tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan agama sangatlah *urgent*. Pendidikan agama dikelompokkan kepada pendidikan yang wajib diberikan kepada seluruh peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya. Pendidikan agama itu tentunya dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya pendidikan nasional pada aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia (Bab II, pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003). Lebih dipertegas lagi kedudukan pendidikan agama pada Bab V, pasal 12 (1) UU No. 20 Tahun 2003 mengenai hak peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Apabila pendidikan agama ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan agama mestilah mampu mengantarkan seorang peserta didik kepada terbinanya setidaknya tiga aspek. *Pertama*, aspek keimanan mencakup seluruh *arkanul iman*. *Kedua*, aspek ibadah mencakup seluruh *arkanul Islam*. *Ketiga*, aspek akhlak mencakup seluruh *akhlaqul karimah* (akhlak mulia) (Haidar Putra Daulay, 2012:74). Sebagaimana disampaikan juga oleh Zakiyah Darajdat (1996:28) bahwa syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang apabila hanya diajarkan saja, akan tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan agama (Islam) adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebagaimana disebutkan maka pendidikan agama perlu diberikan pada semua jenjang dan jenis sekolah dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah tingkat dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (PT).

Mengingat pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang sangat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan, maka pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keluarga sebagai instansi pendidikan yang dasar dan menjadi tempat untuk menanamkan pendidikan agama secara dini. Begitu juga masyarakat dan pemerintah melalui instansi atau lembaga bentukannya juga sangat berperan penting untuk menumbuhkembangkan nilai agama pada pribadi anak. Ketiga instansi ini (keluarga, masyarakat, dan pemerintah) harus saling mendukung dan bersinergi untuk tujuan bersama dalam penanaman nilai agama. Hal ini sebagaimana disampaikan Aris Muthohar (2001:68) dalam bukunya *Tata Krama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* yang mengatakan bahwa ketiga lembaga pendidikan tersebut merupakan bagian yang *integrated* dalam menanamkan moralitas anak.

PENDIDIKAN MORAL

Pendidikan sejati merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pamanusiaan yang normal. Kata lainnya, pendidikan adalah ‘moralisasi masyarakat’ terutama peserta didik (Sudarwan Danim, 2006:63-64). Pendidikan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar sekolah (*education not only education as schooling*), akan tetapi pendidikan sebagai jaring-jaring kemasyarakatan (*education as community networks*). Hal senada juga disampaikan Mulyasa (2011:5), bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan, serta membangkitkan nafsu generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi, dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh.

Pengertian ‘moral’ memiliki pengertian yang sama dengan akhlak (*khulq*), *character*, *disposition*, budi pekerti, dan etika (Muhaimin et al., 2007:226). Moralitas, moralisasi, tindakan moral, dan demoralisasi merupakan realitas hidup dan ada di sekitar kita (Danim Sudarwan,

2006:65). Menurut Ross Poole sebagaimana dikutip Danim Sudarwan (2006:65), terkadang konsep moralitas (*morality*) itu telah disingkirkan, meski tidak mungkin akan hilang (raib) di dunia ini. Konsep moralitas itu akan menjadi konsep yang bisa kita akui memiliki tempat di dalam suatu cara hidup yang koheren, bermakna dan memuaskan bagi kita. Kebermaknaan itu tercermin dari keamanan, kenyamanan, kebersahabatan, kebertanggungjawaban, ketenangan, tanpa prasangka, kepastian bertindak, memegang kesepakatan, dan keceriaan hidup.

Dalam Islam moral sering merupakan terjemahan dari kata akhlak (Abuddin Nata, 2012:209). Di kalangan ulama terdapat berbagai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan akhlak. Murthada Muthahari (1995:30-32), misalnya, mengatakan bahwa akhlak mengacu kepada suatu perbuatan yang bersifat manusiawi, yaitu perbuatan yang lebih bernilai dan sekedar perbuatan alami seperti makan, tidur, dan sebagainya. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang memiliki nilai, seperti berterimakasih, khidmah kepada orang tua, dan sebagainya. Apabila seseorang mendapatkan perlakuan yang demikian baik dari orang lain, maka orang tersebut sudah pasti akan berterimakasih kepadanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Miskawaih (tt: 143), menurutnya akhlak adalah suatu perbuatan yang lahir dengan mudah dari jiwa yang tulus, tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran lagi. Berdasarkan definisi ini, maka perbuatan akhlak harus memiliki lima ciri sebagai berikut. *Pertama*, perbuatan tersebut telah mendarah daging atau mempribadi, sehingga menjadi identitas orang yang melakukannya. *Kedua*, perbuatan tersebut dilakukannya dengan sangat mudah, gampang, serta tanpa memerlukan pikiran lagi, sebagai akibat dari telah mempribadinya perbuatan tersebut. *Ketiga*, perbuatan tersebut dilakukannya atas kemauan dan pilihan sendiri, bukan karena paksaan dari luar. *Keempat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan sebenarnya, bukan berpura-pura, sandiwara, tipuan atau yang sering kita dengar saat ini dengan perbuatan ‘pencitraan’. *Kelima*, perbuatan tersebut dilakukan semata-mata niat karena Allah Swt. Berdasarkan definisi-definisi tersebut terlihat bahwa akhlak terkait dengan

perbuatan yang baik, terpuji, bernilai luhur, berguna bagi orang lain. Perbuatan-perbuatan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai ukuran atau patokan dalam menentukan tingkah laku orang. Dengan dijadikannya akhlak tersebut sebagai patokan, maka akhlak menjadi moral.

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam GBHN dan tujuan kelembagaan sekolah serta tujuan pendidikan moral yang diberikan pada tingkat sekolah dan perguruan tinggi, maka pendidikan moral di Indonesia bisa dirumuskan untuk sementara sebagai berikut: “Pendidikan moral adalah suatu program pendidikan (sekolah dan luar sekolah) yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan” (Nurul Zuriah, 2008:22).

Menurut paham ahli pendidikan moral, sebagaimana disampaikan Dreeben dalam Nurul Zuriah (2008:22), jika tujuan pendidikan moral akan mengarahkan seseorang menjadi bermoral, yang penting adalah bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam tahap awal perlu dilakukan pengondisian moral (*moral conditioning*) dan latihan (*moral training*) untuk pembiasaan.

John Dewey berpendapat, pendidikan moral hampir sama dengan rasional, dimana penalaran moral dipersiapkan, sebagai prinsip berpikir kritis untuk sampai pada pilihan dan penilaian moral (*moral choice and moral judgment*) yang dianggap sebagai pikiran dan sikap terbaiknya (Nurul Zuriah, 2008:22).

Terkait dengan pendidikan moral yang berkembang di Indonesia ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, dengan mempelajari kawasan nilai-nilai sentral seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam GBHN dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka pendidikan moral di Indonesia bertujuan untuk menanamkan seperangkat nilai-nilai yang menjadi ciri manusia Indonesia seutuhnya yang menyelaraskan nilai-nilai agama dan kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini adalah ideologi,

organisasi masyarakat, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, dan teknologi (Koentjaraningrat, 2004:2).

Kedua, pendidikan moral adalah suatu program (sekolah dan luar sekolah) yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber moral serta disajikan dengan memerhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga, walaupun isi pendidikan moral Pancasila pada dasarnya bersumber dan bertujuan untuk menumbuhkan *public culture*, tetapi materi tersebut tidak dapat dilepaskan dan erat hubungannya dengan upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebaliknya, walaupun pendidikan agama pada dasarnya bersumber pada upaya menumbuhkan *public culture*.

Keempat, isi pendidikan moral hendaknya disusun dalam bentuk generalisasi agar memungkinkan seseorang untuk mengkaji kebenaran generalisasi tersebut. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Kelima, karena latihan moral (*moral training*) dan pengkondisian moral (*moral conditioning*) kelihatannya agar menonjol dalam pendidikan moral, maka penambahan berbagai materi ilmu pengetahuan dan masalah sosial hendaknya memperkaya pendidikan moral agar terjadi pula penalaran moral (*moral reasoning*) dan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development*).

Keenam, untuk lebih meningkatkan keberhasilan pendidikan moral, hendaknya dalam topik-topik tertentu digunakan pendekatan metode penyampaian yang berorientasi pada *field psychology*, pendekatan pemecahan masalah, dan metode inkuiri. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Ketujuh, upaya mencapai keberhasilan dalam pendidikan moral merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pengertian *hidden*

curriculum perlu dikembangkan agar seluruh program di sekolah dan masyarakat memberikan sumbangan dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan moral. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Nurul Zuhriah, 2008:26-27).

TAWARAN ALTERNATIF: STRATEGI PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL DI ERA GLOBALISASI

Era globalisasi adalah merupakan era yang sudah ada dan berlangsung. Sebagai bagian yang ikut menyongsong dan mengalami era tersebut, kita tidak boleh menghindar atau bahkan melawan dengan segala upaya beserta argumentasinya. Upaya yang lebih bijak adalah bagaimana menghadapi era globalisasi ini dengan kesungguhan upaya untuk menikmati pengaruh positifnya dan menepis pengaruh negatif yang menyertainya. Di sinilah peran strategis pendidikan, khususnya pendidikan agama, yang secara terbuka baik secara langsung atau tidak langsung dibebankan tugas untuk menanamkan benih-benih nilai agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah memaparkan beberapa faktor penyebab terjadinya dekadensi moral, urgensi pendidikan agama dan kedudukannya, serta pendidikan moral maka penulis memberikan tawaran alternatif dalam revitalisasi peran strategis pendidikan agama Islam (PAI). Tawaran alternatif di sini menitikberatkan pada peneguhan kembali strategi PAI dalam menumbuhkan moralitas pada generasi bangsa khususnya kalangan pelajar. Strategi alternatif ini akan efektif jika disertai dengan keseradan secara kolektif dari pihak-pihak yang ikut andil bertanggung jawab dalam penanaman moralitas pada anak atau generasi masa depan. Adapun revitalisasi strategi PAI yang dapat dilakukan guna menumbuhkan moralitas (*akhlaq al-karimah*) pada generasi bangsa adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, Pendidikan moral dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan *modelling* dan *exemplary*. Yaitu mencoba dan membiasakan

peserta didik dan lingkungan pendidikan secara keseluruhan untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai yang benar dengan memberikan model atau teladan (*uswah al-khasanah*). Dalam hal ini, setiap guru, tenaga administrasi, dan lain-lain di lingkungan sekolah haruslah menjadi “teladan yang hidup” bagi para peserta didik. Selain itu, mereka harus siap untuk bersikap terbuka dan mendiskusikan nilai-nilai moralitas yang baik tersebut dengan para peserta didik. Dengan demikian akan terjadi proses internalisasi intelektual bagi peserta didik.

Kedua, pendidikan moral dapat dilakukan dengan memantapkan pelaksanaan pendidikan agama, karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik.

Ketiga, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus dirubah dari model pengajaran agama kepada pendidikan agama. Pengajaran agama dapat berarti *transfer of religion knowledge* (mengalihkan pengetahuan agama) atau mengisi anak dengan pengetahuan tentang agama, sedangkan pendidikan agama bisa berarti membina dan mewujudkan perilaku manusia yang sesuai dengan tuntutan agama. Hal ini sebagaimana disampaikan Ki Butarsono dalam Yulianingsih (2002:32) berpendapat bahwa pendidikan seharusnya diarahkan agar tidak hanya mengejar intelektual saja. Akan tetapi, moral anak didiknya juga harus diperkuat. Jika yang dikejar hanya intelektualnya saja maka dinamakan pengajaran, tetapi jika yang dikejar intelektual dan moralnya maka hal itu bisa dikatakan sebagai pendidikan.

Pendidikan anak bisa dilakukan dengan membiasakan anak berbuat baik dan sopan santun tentang berbagai hal mulai sejak kecil sampai dewasa. Seorang anak dibiasakan makan, minum, tidur, berjalan, berbicara, berhubungan dengan orang sesuai ketentuan agama. Ketika makan dan minum dibiasakan memakan makanan dan meminum minuman yang halal, baik dan sehat, cara makan yang baik, berdoa sebelum dan sesudah makan dan seterusnya. Ketika tidur dibiasakan cara tidur yang baik, berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur. Ketika berjalan dibiasakan cara berjalan

yang baik, berdoa ketika akan bepergian dan ketika sampai pada tujuan. Selanjutnya ketika berbicara dibiasakan berbicara yang baik, apa yang boleh dan dibicarakan bersikap baik dan sopan kepada lawan bicara yang berbeda-beda tingkatannya. Ketika bergaul dengan orang lain dibiasakan pula sikap rendah hati, *tawadlu'*, dan bersahabat dengan orang lain. Selanjutnya dibiasakan juga bersikap jujur, adil, konsekuen, ikhlas, pemaaf, sabar, berbaik sangka, dan sebagainya dalam berbagai aspek kehidupan.

Keempat, pendidikan moral dapat dilakukan dengan pendekatan *integrated*, yaitu dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu pengetahuan. Pendidikan moral bukan hanya terdapat dalam pendidikan agama saja, melainkan juga terdapat pada pelajaran bahasa, logika, matematika, fisika, biologi, sejarah, dan sebagainya. Pelajaran bahasa misalnya melatih dan mendidik manusia agar berbicara yang sistematis. Pelajaran matematika mendidik manusia berpikir yang sistematis dan logis, objektif, jujur, ulet, dan tekun. Pelajaran fisika mendidik manusia agar mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan yang terdapat pada ciptaan-Nya. Pelajaran Biologi mendidik manusia agar bekerja teratur. Dan, pelajaran sejarah mendidik manusia agar selalu berpihak pada kebenaran.

Kelima, sejalan dengan cara yang ketiga tersebut di atas, pendidikan moral harus melibatkan seluruh guru. Pendidikan moral bukan hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja seperti yang selama ini ditekankan, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh guru.

Keenam, pendidikan moral harus didukung oleh kemauan, kerja sama yang kompak dan usaha yang serius dari keluarga/rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua di rumah harus meningkatkan perhatiannya terhadap anak-anaknya dengan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, teladan, dan pembiasaan yang baik. orang tua juga harus berupaya menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang, dan tentram sehingga si anak merasa tenang jiwanya dan dengan mudah dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif. Sekolah juga harus berupaya menciptakan lingkungan yang bernuansa religius, seperti membiasakan shalat berjamaah, menegakkan disiplin dalam kebersihan, ketertiban, kejujuran, tolong-

menolong, sehingga nilai-nilai agama menjadi kebiasaan, tradisi, atau budaya seluruh siswa. Sikap dan perilaku guru yang kurang dapat diteladani atau menyimpang hendaknya tidak segan-segan diambil tindakan. Sementara itu masyarakat juga harus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan akhlak, seperti membiasakan shalat berjamaah, gotong royong, kerja bakti, memelihara ketertiban dan kebersihan, menjauhi hal-hal yang dapat merusak moral, ikut serta mengawasi dan mengambil tindakan terhadap para pengedar peredaran obat-obat terlarang, gambar-gambar porno, perkumpulan perjudian, dan sebagainya. Masyarakat harus membantu menyiapkan tempat bagi kepentingan pengembangan bakat, hobi, dan keterampilan para remaja, seperti lapangan olah raga, balai-balai latihan, dan sebagainya.

Ketujuh, pendidikan moral harus menggunakan seluruh kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern. Kesempatan berekreasi, pameran, kunjungan, berkemah, dan sebagainya harus digunakan sebagai peluang untuk membina moral. Demikian pula berbagai sarana seperti masjid, mushola, lembaga-lembaga pendidikan, surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan sebagainya dapat digunakan untuk membina moral.

Kedelapan, penanaman moral dapat dilakukan dengan membangun dan meningkatkan kekuatan hati nurani moral (*moral consequence*) dengan cara meningkatkan rasa keagamaan yang mendalam (spiritualitas) terlebih dahulu. Pendidikan diarahkan untuk *Touching* bukan pada *Teaching* semata. Spiritualitas di sini adalah inti dari hati nurani moral (*moral consequence*). Hati nurani moral ini merupakan kekuatan ruhaniyah dan keimanan yang member semangat kepada seseorang untuk berbuat terpuji (*good character*) dan menghalanginya dari berbuat jahat (*bad character*). Mental character consequence dapat menguasai dan mengawasi seseorang dalam setiap gerakannya dan merupakan titik tolak seseorang untuk bersikap dan berbuat. Iman yang letaknya dalam hati akan menimbulkan konsekuensi logis terhadap tindakan-tindakan mental berkarakter berupa pengalaman normanorma Islam (*moral judgement*), tanggung jawab moral (*moral responsibility*), dan ganjaran moral (*moral rewards*).

SIMPULAN

Dari pemaparan tulisan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Titik tumpu pendidikan agama Islam (PAI) yang paling sentral adalah apa yang dinamakan *structure of religious person*, dimana menggambarkan personalita seseorang atau manusia yang merupakan internalisasi nilai-nilai religiusitas yang di dalamnya tertanam moralitas secara utuh, yang diperoleh dari hasil sosialisasi nilai-nilai religius/moral itu sepanjang kehidupannya, termasuk hasil pergulatan seseorang di dalam mengikuti proses pendidikan. Dengan demikian, revitalisasi strategi PAI betul-betul harus diupayakan secara maksimal dan konsisten (*istiqomah*).
2. Perlu diingat bahwa krisis moralitas yang terjadi di kalangan remaja generasi bangsa salah satu indikator penyebab terbesarnya adalah kegagalan dari dunia pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Dengan demikian ketiga lembaga tersebut harus berbenah, bersatu-padu, bersinergi secara efektif dalam menanamkan nilai-nilai moralitas dan tatakrama budi pekerti yang luhur. Jika ketiga lembaga ini saling mengisi, diharapkan akan dapat membentuk anak didik, sebagai generasi masa depan, yang bermoral luhur mulia.

Akhirnya, semoga upaya yang selalu kita usahakan menjadi amal baik dan sumbangsih berharga bagi kemajuan suatu bangsa. Tulisan ini hanyalah produk rekonstruksi tersistematis pengetahuan dari sekian banyak pemikiran para ahli yang kemudian disajikan dengan pendekatan filosofis pedagogik. Apabila ada hal yang baik dan berharga sudilah kiranya pembaca menindaklanjutnya, sebaliknya jika ada suatu hal yang kurang maka dengan segala kerendahan hati penulis meminta saran dan koreksi yang membangun demi tercipta format ideal dari upaya yang kita usahakan. *Wallahua'lam bish-showab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2006. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daulay, Haidar Putra. 2012. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Daradjat, Zakiah. 1979. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung
- . 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husain, S.S. dan Ashraf, S.A. 2000. *Krisis Pendidikan dalam Islam*. Jakarta: Al-Mawardi Prima
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Nata, Abuddin. 2012. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Maragustam. 2010. *Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)*. Yogyakarta: Nuha Litera.
- Miskawaih, Ibn. Tt. *Tahdzib al-Akhlaq wa Tahhir al-Araq*. Mesir: Dar al-Kutub
- Muhaimin, et. Al. 2007. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Mulkhan, Abdul Munir, dkk. 1998. *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren, Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyasa, Enco. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Filsafat Akhlak*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Muthohar, M. Aris. 2001. *Tata Krama di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: SIC
- Mudji, Sutrisno SJ. 1994. *Dialog Kritis dan Identitas Agama*. Bandung: Mizan.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yulianingsih dan Ismantoro. 2002. *Dengan Budi Pekerti Mendidik Anak Didik Seutuhnya*. Suplemen Republika, Sabtu, 11 Mei 2002

Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jogjakarta: Gigraf Publishing.